

Judul : Petahana Rawan Korupsi
Tanggal : Senin, 07 Mei 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Petahana Rawan Korupsi

Hampir 50 persen anggota DPR yang diproses hukum oleh KPK telah menjabat lebih dari satu periode. Partai politik tidak dapat lepas tangan dari kondisi ini.

JAKARTA, KOMPAS — Hampir 50 persen anggota DPR yang selama ini diproses hukum oleh KPK telah menjadi anggota legislatif lebih dari satu periode. Korupsi yang mereka lakukan umumnya berupa suap.

Berdasarkan data dari KPK, ada 65 anggota DPR dari periode 1999-2019 yang telah diproses hukum oleh KPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 orang terpilih sebagai wakil rakyat tidak hanya sekali.

Terakhir, KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, sebagai tersangka suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2018. Amin menjabat sebagai anggota DPR sejak periode 2009-2014.

Selain Amin, juga ditangkap

Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yaya Purnomo serta dua pihak swasta, yaitu Eka Kamaluddin dan Ahmad Ghaist.

Terkait kasus ini, Partai Demokrat memberhentikan Amin dari keanggotaan di Partai Demokrat dan di DPR.

Menteri Keuangan Sri Muliyil Indrawati, Minggu (6/5/2018), dalam pesannya kepada *Kompas*, juga menegaskan segera membebaskan Yaya Purnomo. Penangkapan Amin dan Yaya merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, mengatakan, potensi korupsi di bidang anggaran, seperti yang terjadi dalam kasus Amin, di antaranya disebabkan

adanya kelemahan di sistem. Perbaikan mendesak dilakukan dengan menerapkan sistem elektronik dalam perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*). "*E-planning* dan *e-budgeting* merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dapat digunakan untuk pencegahan," ujar Tsani.

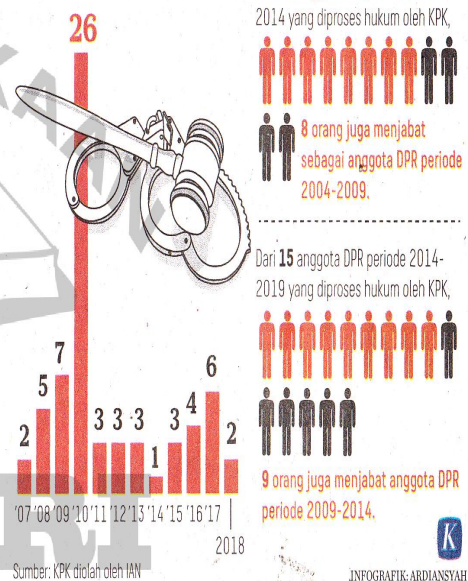
Saat ini, KPK terus membahas skema *e-planning* dan *e-budgeting* dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenkeu.

Partai politik

Perbaikan juga mendesak dilakukan di partai politik, terutama dalam seleksi anggota legislatif. Pasalnya, korupsi yang dilakukan anggota DPR ini tidak bisa dilepaskan dari parpol.

"Jangan partai menerima dan kemudian menyodorkan na-

Jumlah Anggota DPR yang Diproses Hukum oleh KPK



Dari 12 anggota DPR periode 2009-2014 yang diproses hukum oleh KPK,

8 orang juga menjabat sebagai anggota DPR periode 2004-2009.

Dari 15 anggota DPR periode 2014-2019 yang diproses hukum oleh KPK,

9 orang juga menjabat anggota DPR periode 2009-2014.

pemberantasan korupsi," ujar Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Almas Sjafrina.

(LAS/IAN/BOW)

klik.kompas.id/hentikananggxi